



WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI PILAR GEOPOLITIK INDONESIA: STRATEGI INTEGRASI NASIONAL DI ERA DINAMIKA GLOBAL

THE ARCHIPELAGO INSIGHT AS A PILLAR OF INDONESIA'S GEOPOLITICS: A NATIONAL INTEGRATION STRATEGY IN THE ERA OF GLOBAL DYNAMICS

**Alfiana Nurul Fadillah¹, Tiarma Elisabeth Nainggolan², Wishmar Samuel Siregar³,
Yonathan Louis Pratama Lase⁴, Julia Ivanna⁵**

Universitas Negeri Medan

Email: Padilapadila25@gmail.com¹, elisabetnainggolan730@gmail.com²,
siregarwishmar@gmail.com³, yonatalase8@gmail.com⁴, juliaivanna@unimed.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 05-10-2025

Revised : 06-10-2025

Accepted : 08-10-2025

Published : 11-10-2025

Abstract

The Nusantara Insight is a key pillar of Indonesian geopolitics, affirming the territorial unity, nationhood, and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in facing global and domestic challenges. This concept is rooted in Ir. Soekarno's view of the importance of national and territorial unity as the foundation of a sovereign state, and is imbued with the values of Pancasila, which emphasize justice, unity, and prosperity. As an application of Indonesia's unique geopolitics, the Nusantara Insight serves to integrate all elements of the nation into a unified political, economic, social, cultural, and defense and security framework. In the context of national development, the Nusantara Insight serves as an integration strategy capable of strengthening nationalism, ensuring equitable development, and maintaining territorial integrity from Sabang to Merauke. However, its implementation faces various challenges such as development inequality, socio-cultural differences, and the influence of globalization, which has the potential to weaken national identity. Therefore, strengthening national values through education, economic equality, and adapting to advances in science and technology is necessary. Thus, the Indonesian Archipelago Outlook is not merely a geopolitical concept, but rather a national strategy that serves to maintain national integration and strengthen Indonesia's position as a sovereign, just, and distinctive archipelagic nation amidst global dynamics.

**Keywords: Indonesian Archipelago Outlook, Indonesian Geopolitics,
National Integration**

Abstrak

Wawasan Nusantara merupakan pilar utama geopolitik Indonesia yang menegaskan kesatuan wilayah, bangsa, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Konsep ini berakar pada pandangan Ir. Soekarno tentang pentingnya kesatuan bangsa dan wilayah sebagai dasar negara yang berdaulat, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Sebagai bentuk penerapan geopolitik khas Indonesia, Wawasan Nusantara berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam konteks pembangunan nasional, Wawasan Nusantara menjadi strategi integrasi yang mampu memperkuat rasa kebangsaan, pemerataan pembangunan, serta menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan pembangunan, perbedaan sosial-budaya, dan pengaruh globalisasi yang berpotensi melemahkan identitas nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai kebangsaan melalui pendidikan, pemerataan ekonomi, serta adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Wawasan Nusantara bukan hanya konsep geopolitik, melainkan strategi



nasional yang berfungsi menjaga integrasi bangsa dan meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, adil, dan berkepribadian di tengah dinamika global.

Kata Kunci: Wawasan Nusantara, Geopolitik Indonesia, Integrasi Nasional

PENDAHULUAN

Wawasan Nusantara adalah konsep dasar yang menjadi pilar geopolitik bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan integrasi nasional di tengah tantangan global dan internal yang kompleks. Konsep ini menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, meliputi darat, laut, dan udara serta seluruh rakyatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan keamanan. Istilah “wawasan” sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti “cara melihat atau memandang”, sehingga Wawasan Nusantara dapat dipahami sebagai cara memandang atau perspektif bangsa Indonesia terhadap ruang hidup dan keragaman yang dimiliki sebagai satu kesatuan (Pasaribu, 2015).

Wawasan Nusantara bukanlah konsep baru, melainkan lahir dari perjuangan bangsa Indonesia dalam menetapkan landasan negara dan identitas nasional. Tokoh proklamator Indonesia, Ir. Soekarno, dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, menekankan pentingnya kesatuan bangsa dan wilayah sebagai syarat mutlak berdirinya sebuah negara yang kuat dan berdaulat. Beliau menyatakan, "Kesinilah kita semua harus menuju: membangun satu staat nasional, di atas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian." Soekarno menekankan bahwa Indonesia yang merdeka bukan semata-mata terdiri dari bagian-bagian kecil, melainkan merupakan satu negara nasional yang utuh dan bersatu. Konsep ini menjadi dasar bagi lahirnya Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang melanda kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain dimensi historis dan filosofis, Wawasan Nusantara juga lahir sebagai respons terhadap kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak strategis di antara dua benua dan dua samudra. Posisi geografis ini memberikan keunggulan sekaligus tantangan, sehingga perlu adanya pandangan geopolitik yang mampu mengintegrasikan keberagaman budaya, etnis, dan wilayah dengan semangat kebangsaan yang kokoh (Respatiadi et al., 2021). Wawasan Nusantara juga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, memperkuat pertahanan negara, dan menumbuhkan rasa nasionalisme dalam masyarakat agar persatuan tetap terjaga di tengah arus globalisasi.

Dengan demikian, pemahaman dan implementasi Wawasan Nusantara menjadi sangat penting sebagai pijakan dalam menyatukan berbagai elemen bangsa dan wilayah dalam satu kesatuan yang kuat dan harmonis. Hal ini juga sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesejahteraan bersama serta menjaga keharmonisan antarwarga negara yang beragam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada pemahaman konseptual dan filosofis mengenai Wawasan Nusantara sebagai pilar geopolitik Indonesia serta relevansinya terhadap strategi integrasi nasional di tengah dinamika global. Melalui metode ini, penelitian berupaya



menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan makna dari konsep Wawasan Nusantara secara mendalam berdasarkan konteks historis, geografis, dan ideologis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku-buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta sumber daring yang kredibel. Beberapa referensi utama mencakup karya dari Pasaribu (2015), Respatiadi dkk. (2021), dan Najicha (2017) yang membahas aspek geopolitik, nasionalisme, dan ketahanan nasional dalam perspektif Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna, keterkaitan, dan implikasi dari Wawasan Nusantara terhadap integrasi nasional serta kebijakan geopolitik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah dan masyarakat membutuhkan suatu konsep berupa wawasan kebangsaan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa, menjaga keutuhan wilayah, serta mempertahankan identitas nasional. Istilah “wawasan” sendiri berasal dari kata “wawas” dalam bahasa Jawa yang berarti melihat atau memandang. Dengan tambahan akhiran “- an”, kata tersebut secara harfiah dapat diartikan sebagai cara melihat, cara meninjau, atau cara memandang.

Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam ekstensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan propinsional), regional, serta global (Alav, 2016).

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama yaitu, bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup, jiwa tekad dan semangat manusianya atau rakyatnya dan lingkungan sekitarnya (Humaira, 2021).

Sejarah Geopolitik

Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1844- 1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*), istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi *Geographical Politic*. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik (*Geographical Politic*) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi (Dwi Sulisworo, 2012).

Frederich Ratzel (1844–1904) berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai ruang hidup).



Rudolf Kjellen (1964–1922) melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut

Istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia dipopulerkan pertama kali oleh Ir. Soekarno. Pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan pidato tersebut, berdasarkan geopolitik, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan.

Ir. Soekarno dalam pidatonya menyebutkan bahwa syarat bangsa menurut Renan Ernest adalah “Le desir d’etre ensemble dan Character-gemeinschaft” yaitu suatu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Dengan kata lain syarat bangsa adalah kehendak untuk Bersatu. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara.

Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Pasaribu, 2015).

Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia.

Dasar Filosofi dan Latar Belakang

Pengembangan Wawasan Nusantara

Dasar filosofi Wawasan Nusantara dihapus dari nilai-nilai Pancasila yang mengandung ajaran keimanan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan yang bertujuan menciptakan perdamaian dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia secara berkelanjutan (Respatiadi dkk., 2021).

Latar belakang pengembangan Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan terbesar di dunia, dengan posisi strategis di antara dua benua dan dua samudera. Kondisi ini membawa keuntungan sekaligus kerawanan, karena bangsa



Indonesia harus mampu mengelola keanekaragaman sumber daya alam dan budaya di tengah tekanan dan ancaman dari kepentingan bangsa lain. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara dikembangkan sebagai pandangan geopolitik yang mengedepankan persatuan wilayah dan bangsa, serta strategi nasional untuk mempertahankan pelestarian dan mencapai tujuan nasional (Respatiadi dkk., 2021).

Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi obyektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup bangsa yang didalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi keputusan politik negara tersebut. Kondisi obyektif geografi Nusantara, yang merupakan untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa dan letak posisi yang strategis.

Wilayah Indonesia saat 17 Agustus 1945 masih mengikuti *Territoriale Zee En Marittieme Kringen* Ordonantie tahun 1939, di mana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Penetapan wilayah laut 3 mil tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pergolakan-pergolakan negeri saat itu.

Atas pertimbangan berbagai hal, dimaklumkanlah Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang berbunyi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.

Penentuan batas laut teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia,...". Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri dan merupakan satu kesatuan utuh dengan kekayaan alam didalamnya.

Peran Wawasan Nusantara Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa

Wawasan Nusantara berperan sebagai landasan, motivasi, sekaligus pendorong dalam menentukan keputusan, kebijakan, tindakan, maupun perilaku, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pokok dari Wawasan Nusantara adalah menanamkan semangat nasionalisme yang kuat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki posisi strategis, karena melalui proses pendidikan masyarakat dapat berkembang menjadi lebih maju, kritis, bermoral, serta memiliki daya saing yang setara dengan bangsa lain (Najicha, 2017).

Wawasan Nusantara dapat menjadi perekat untuk menjaga persatuan dalam keragaman budaya dan kompleksitas geografis Indonesia, serta memainkan peran strategis dalam



membangkitkan nasionalisme dan menjaga keutuhan NKRI.

Secara keseluruhan, Wawasan Nusantara dianggap sebagai konsep penting yang harus diterapkan secara konsisten untuk menghadapi berbagai tantangan modern, baik dari segi globalisasi maupun dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa (Cahyaningrum, 2024).

Peran Wawasan Nusantara dalam memperkuat persatuan bangsa memiliki signifikansi yang besar karena berfungsi sebagai perekat di tengah keragaman yang dimiliki Indonesia. Sebagai negara dengan ratusan suku, bahasa, dan budaya, kehadiran Wawasan Nusantara menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai persatuan dalam keberagaman tersebut. Hal ini memungkinkan setiap individu maupun kelompok merasa sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Kendati demikian, penerapan Wawasan Nusantara tidak lepas dari berbagai tantangan yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Salah satu di antaranya adalah deras arus globalisasi yang membawa nilai-nilai baru, yang terkadang tidak sejalan dengan budaya lokal. Perkembangan teknologi dan pengaruh media global bahkan dapat menggeser identitas nasional, terutama di kalangan generasi muda. Kedua, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah masih menjadi persoalan serius yang memunculkan rasa ketidakadilan sosial. Wilayah-wilayah yang merasa tertinggal sering kali menumbuhkan potensi disintegrasi karena kurangnya perhatian dari pemerintah (Salsabila dkk., 2020).

Penerapan Wawasan Nusantara Dalam Kebijakan Geopolitik Dan Ketahanan Nasional

Wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik Indonesia yang menjadikan wilayah nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan. Konsep ini merupakan landasan penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Implementasi wawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran terhadap keberagaman dan semangat persatuan menjadi kunci utama. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan Wawasan Nusantara sangat penting untuk memperkuat integrasi

nasional. (Departemen Pendidikan Nasional, 2010)

Dalam bidang politik, implementasi Wawasan Nusantara tercermin dalam praktik demokrasi yang menjunjung tinggi keberagaman. Pemilihan umum yang inklusif, keterwakilan daerah dalam lembaga legislatif, dan kebijakan desentralisasi merupakan wujud nyata penerapan nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat dari berbagai suku dan agama sebagai bentuk penghormatan terhadap pluralitas. Keteguhan dalam menjaga persatuan dalam perbedaan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan global. Peran lembaga politik sangat penting dalam menginternalisasi nilai kebangsaan ke dalam sistem pemerintahan. (Susanto, 2020)

Wawasan Nusantara juga mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi daerah, serta perlindungan produk lokal merupakan contoh konkret implementasi kebijakan ekonomi berwawasan kebangsaan. Pemerintah mendukung sektor UMKM di berbagai provinsi untuk meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, program seperti Dana Desa menunjukkan upaya konkret pemerataan kesejahteraan. Kesadaran masyarakat untuk membeli produk lokal juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. (Rahmawati & Nugroho, 2019).



Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Wawasan Nusantara

Tantangan dan hambatan dalam impelametasinya yakni terdapat pada perbedaan suku, budaya, Agama, Ras, yang dimana dimana hambatannya itu tidak hanya pada manusianya saja, tetapi juga pada geografi Indonesia. Hal ini mengingat negara kita yang merupakan negara maritim dan terpisah-pisah karena banyaknya pulau, yang dimana hal ini jelas menjadi penghambat kemajuan di segala sektor, Baik itu dibidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. dengan keadaan tersebut, hal ini akan menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat yang berada di daerah yang berada dipelosok atau jauh dari pusat negara karena adanya ketidakmerataan pembangunan di daerah tersebut yang memunculkan kelompok separatistis karena kecemburuan dan rasa terpinggirkan karena hal tersebut. Selain dari itu, hambatan lainnya itu adalah timbulnya perpecahan antar sesama bangsa yang sebagaimana terjadinya konflik yang menjadi catatan kelam bagi sejarah bangsa seperti “Perang Sampit” dan juga “peristiwa Ambon”, yang dimana pada peristiwa tersebut pecah diantara Anak bangsa yang hanya karena perbedaan ras, suku, dan Agama. Terlebih lagi dengan kemajuan teknologi saat ini yang dimana perpecahan tersebut bukan hanya terjadi pada interaksi manusia antar manusia pada dunia nyata, tetapi juga terjadi pada medsos yang dimana adanya rasa saling menghina karena adanya perbedaan dan yang tidak sama dengannya. Dari hal tersebut terlihat jelas bahwa hambatan dalam Implementasi Wawasan Nusantara bukan hanya dari terjadi pada antar manusia, dan geografi saja. Tetapi juga terjadi pada media sosial, karena hal tersebut pemerintah telah merapakan langkah- langkah dalam menjaga dan keutuhan bangsa dengan menerapkan :

1. Menggali, menghimpun, mengidentifikasi, mendeskripsikan berbagai aspek budaya, menyusun peta bahasa dan peta etnografi melalui suatu pusat studi nasional yang juga memiliki sistem informasi budaya secara nasional;
2. Mengadakan kontak lintas budaya dan media apresiasi antar budaya dengan prinsip saling mengakui, saling menghargai, saling melengkapi untuk memperkaya khasanah budaya nasional;
3. Pengarahan pendidikan anak sejak dini untuk memahami dan menghargai budaya lokal dan juga memahami dan menghargai budaya dari kelompok suku bangsa lain;
4. Terus mengembangkan pendidikan agar secara aktual dapat selalu menjawab tuntutan dan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan zaman sebagai upaya sadar mewariskan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berwawasan kebangsaan;
5. Meningkatkan daya adaptasi masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan meningkatkan nasionalisme bangsa dan wawasan kebangsaan, mudah-mudahan hal-hal yang menyangkut fanatisme golongan yang bersumber pada primordialisme dapat terkikis secara berangsur-angsur.

KESIMPULAN

Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik khas Indonesia yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia yaitu darat, laut, dan udara dan beserta seluruh rakyatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Konsep ini lahir sebagai respon terhadap kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku,



budaya, serta sumber daya alam, yang menuntut adanya pandangan nasional yang mampu mengintegrasikan keragaman tersebut demi menjaga keutuhan dan pelestarian negara.

Wawasan Nusantara menempatkan persatuan nasional dan kesatuan wilayah sebagai prioritas utama yang dilandasi pada falsafah Pancasila dan amanat konstitusi. Tidak seperti geopolitik negara lain yang sering berorientasi pada ekspansi wilayah, Wawasan Nusantara bertujuan mempertahankan dan memperkuat integrasi nasional dalam kerangka NKRI. Konsep ini menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan keamanan yang berwawasan kebangsaan.

Pelaksana Wawasan Nusantara menghadapi tantangan seperti perbedaan geografis yang luas, ketimpangan pembangunan, serta dinamika sosial budaya yang kompleks. Namun, secara nasional dengan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa serta penanaman nilai-nilai kebangsaan yang kuat melalui pendidikan dan kebijakan, Wawasan Nusantara dapat terus menjadi perekat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Sinaga, L. R., Lingga, M. O., Sitorus, M. T., & Yunita, S. (2025). PERAN WAWASAN NUSANTARA DALAM MEMBANGUN RASA DAN SIKAP NASIONALISME WARGA NEGARA. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Progresif*, 6(3).
- Alav, Ö. (2016). Demokrasi. *Pegem Atif Indeks*, 177–201.
- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan Nusantara Dalam Mememcahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 40-48.
- Cahyaningrum, N. A . (2024). Wawasan Nusantara: Konsep dan Implementasinya dalam Memperkuat Identitas Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 231-238.
- Cahyaningrum, N. A. (2024). WAWASAN NUSANTARA: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 231-238.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2010). Wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Jakarta: Depdiknas.
- Fahri, R., Zahira, M., Prameswari, R., Amanda, D., Barus, E. B., & Sihaloho, O. A. (2024). PERSPEKTIF MAHASISWA FMIPA UNIMED TENTANG WAWASANNUSANTARA UNTUK MEMBANGUN RASA NASIONALISME. *Journal Education and Government Wiyata*, 2(4), 417-424.
- Humaira, A. (2021). Konsep Negara Demokrasi.
- M. S., Marbun, R. H., Rahmadaeni, D., & Delpita, D. (2025). Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4083-4090.
- Najicha, F. U. (2017). Aku Generasi Unggul Masa Depan, Generasi Muda Harapan Bangsa.
- Negara, L. A. (2014). Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jakarta, LAN*.



Nugraha, S. K. (2021). Wawasan Nusantara.

Nurdiansyah, N., Tabita, P., Rahmadani, N.

Pasaribu, R. B. (2015). Bab 7 Wawasan Nusantara. Dalam R. B. Pasaribu, Pendidikan Kewarganegaraan. Depok: Universitas Gunadarma.

Pelawi, E. B., Silalahi, F. T. N., Aulya, K.

Rahmawati, S., & Nugroho, P. (2019). Pemerataan ekonomi dan peran UMKM dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 14(2), 85–97.

Respatiadi, F., Zid, M., & Sya, A. (2021). Peran Guru Geografi dan Pengaplikasiannya dalam Membangun Kesadaran Ruang Warga Negara NKRI. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(Special Issue No. 2), Desember 2021.

Salsabila.K.,Pamungkas,A.,Khoeriyah,U. N.,Kurnia,A.A.,Rasyiddiansyah,D. M.,Sahetapi,N.J. (202). Menggali Peran Wawasan Nusantara Dalam Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Tantangan Global.jurnal esa unggul,4(1).1-6.

Susanto, E. (2020). Demokrasi dan pluralisme dalam kerangka wawasan nusantara. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 12–28.